

Manajemen Komunikasi Proyek Konstruksi di Masa Pandemi Covid-19

Indra Jaya ^{1*}, Gina Cynthia Raphita Hasibuan ¹, Dian Morfi Nasution ²

¹ Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,

² Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,
Jl. Almamater, Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia 20155

Abstrak

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan utusan dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam menjalankan kegiatannya diperlukan suatu manajemen komunikasi yang baik agar seluruh kegiatan proyek dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured in-depth interview*) kepada PPK tentang bagaimana sistem manajemen komunikasi di saat sebelum pandemi dan saat pandemi sedang berlangsung. Permasalahan yang ditemukan saat ini adalah sistem manajemen komunikasi proyek belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai harapan PPK ketika menghadapi dan mengarahkan penyedia barang dan jasa. Untuk mendukung sistem manajemen komunikasi yang baik diperlukan suatu sistem terintegrasi mulai dari pembuatan firma/perusahaan, verifikasi lapangan dalam pemilihan penyedia jasa, evaluasi perpanjangan izin perusahaan. Ini bertujuan agar pengguna jasa mendapatkan calon penyedia jasa yang tepat dan, sesuai harapan. Untuk itu diperlukan sistem informasi teknologi yang mampu mengintegrasikan seluruh mekanisme yang dibuat. Selain itu diperlukan payung hukum terkait adanya usulan dan mekanisme baru yang dibuat.

Kata kunci: manajemen komunikasi; pejabat pembuat komitmen; verifikasi lapangan; pemilihan penyedia jasa; integrasi teknologi; Covid-19

Abstract

[Title: Construction Project Communication Management During the Covid-19 Pandemic] The Committee Making Officer (CMO) is the government's envoy in construction activities, starting from planning, implementation, and supervision. Good communication management is needed to carry out activities to account for all project activities properly. This study uses a qualitative approach, using a semi-structured in-depth interview method to CMO about how the communication management system was before the pandemic and during this ongoing pandemic. The current problem is that the project communication management system needs to be adequately implemented, as evidenced by something that is not in line with the expectations of the CMO in dealing with and directing providers of goods and services. To support a sound communication management system, an integrated system is needed in the creation of firms/companies, field verification in the selection of service providers, and evaluation of the extension of company licenses with the aim that service users get the right candidate for service providers as expected, an information technology system is needed to integrate all mechanisms and a legal umbrella is needed regarding new proposals and mechanisms being made.

Keywords: communication management; commitment officer; field verification; selection of service providers; technology integration; Covid-19

*) Penulis Korespondensi.

E-mail: indrajaya80@usu.ac.id

1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Maret 2020 menyatakan kemunculan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia (Ihsanudin 2020). Sejak saat itu, pandemi melanda Indonesia. Hampir semua sektor merasakan dampak pandemi. Sektor bisnis ikut merasakan dampak ini, terlihat dari lambatnya perekonomian akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa pada kuartal II di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar - 5,32%. Angka ini menunjukkan penurunan pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama di tahun 2019.

Pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi mekanisme manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek tidak bisa lagi dijalankan secara praktis dalam industri konstruksi (Subramaniam *et al.*, 2021). Pandemi Covid-19 sudah menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi proyek akan pelaksanaan kegiatan operasional seperti sebelum masa pandemi. Kekhawatiran ini didasari kenyataan bahwa secara mendadak *remote working* diterapkan berbagai organisasi yang ada di seluruh dunia (Salamin *et al.*, 2021). Masa pandemi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan krisis juga memiliki interdependensi dalam perubahan cara kerja (Garro-Abarca *et al.*, 2021). Pandemi juga berdampak pada proses terkait pekerjaan karena membebani banyak tenaga kerja yang ada dalam tim proyek (Koch & Schermuly, 2021).

Dampak signifikan pada sektor konstruksi terlihat dari banyaknya proyek yang mengalami keterlambatan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini mengakibatkan berkurangnya ketersediaan tenaga kerja pada proyek-proyek konstruksi.

Sementara itu, dengan pertimbangan pencegahan penyebaran virus, pemerintah pusat dan daerah tetap menjalankan program pembangunan dengan mengikuti protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola dan mekanisme kerja aparatur pemerintah yang berubah. Di satu sisi para aparatur pemerintah harus mengikuti rapat-rapat kedinasan, sementara di sisi lain harus menjalankan fungsi *monitoring* dan *controlling* pelaksanaan proyek pembangunan.

Tidak sedikit aparatur pemerintah yang diberikan tanggung jawab atas lebih dari 3 proyek pembangunan, dengan variasi permasalahan lapangan. Hal ini menuntut kinerja yang lebih ekstra. Sementara mereka menghadapi keterbatasan ruang gerak dalam mengikuti rapat-rapat langsung proyek ataupun melakukan kunjungan monitoring kemajuan pekerjaan proyek di lapangan. Aparatur pemerintah tersebut menjadi kurang maksimal dalam menjalankan seluruh rangkaian pekerjaannya. Akibatnya tahap penyelesaian pekerjaan atau serah terima pertama pekerjaan, yang biasa disebut

dengan *Pre Hand Over* (PHO), menjadi terkendala. Dengan begitu, hasil pekerjaan fisik di lapangan tidak selamanya sesuai dengan yang tercantum dalam laporan hasil penyelesaian pekerjaan.

Selain itu, banyaknya pengaduan masyarakat menjadi beban tambahan bagi para aparatur pemerintah. Mereka harus mengalokasikan waktu untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum, baik kepolisian ataupun kejaksaan. Hal ini menyita waktu aparatur pemerintah dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan dan juga monitoring pengerjaan proyek pembangunan. Dampak lanjutan dari hal ini adalah kinerja para aparatur pemerintah itu sendiri.

Faktor-faktor diatas melatarbelakangi perlunya penelitian tentang sistem manajemen komunikasi proyek yang baik, yang memungkinkan proses *monitoring* dan *controlling* proyek berjalan baik dalam keadaan dan situasi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka sistem manajemen komunikasi yang tepat agar kegiatan proyek dapat berjalan dengan kondisi saat dan setelah pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian lain relevan dengan penelitian ini diantaranya kajian yang dilakukan Stiles *et al* (2021). Stiles mengemukakan integrasi Covid-19 kedalam pengelolaan manajemen risiko secara umum. Integrasi ini diperlukan karena adanya perbedaan prioritas terkait risiko keamanan. Pencegahan Covid-19 bisa semakin ditingkatkan dengan adanya integrasi dan komunikasi yang baik mengenai prosedur keselamatan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Prasetyo (2020) melakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif proses rekayasa terjadi dalam pelaksanaan proyek selama pandemi. Hasil penelitian Prasetyo menunjukkan bahwa proses penghitungan kemajuan pelaksanaan konstruksi ataupun persetujuan mengenai *shop drawing* tidak efektif bila diimplementasikan dalam keadaan *Work from home*. Di masa depan, skema konstruksi harus mempertimbangkan dampak suatu epidemi ke dalam strategi dan respon dari pandemi secara global serta risiko konstruksi (terowongan) (Shi *et al.*, 2020). Hal ini menuntut suatu fleksibilitas dan keterampilan dalam koordinasi manajemen proyek agar terjadi peningkatan strategi respon yang cocok dan efektif; disaat yang sama pemerintah daerah bisa membantu memberikan solusi permasalahan ini (Shi *et al.*, 2020). Sementara itu, Ahmed *et al* (2020) menambahkan bahwa penelitian yang menghasilkan pola komunikasi di kala krisis bisa membantu para pelaku industri konstruksi maupun pembuat kebijakan dalam pembuatan keputusan yang strategis. Keputusan tersebut berpusat kepada masyarakat dan bisa mengakomodasi respon dan perbaikan yang efisien dalam menghadapi bencana dengan menggunakan platform *social media* Ahmed *et al* (2020). Penelitian dengan topik yang berbeda dengan

konteks komunikasi di manajemen proyek dilakukan oleh Bednarz *et al.*, (2021) untuk menganalisis dampak Covid-19 pada manajemen proyek yang ada di organisasi berbasis layanan kesehatan. Bednarz *et al* (2021) mempertimbangkan risiko, kinerja proyek, kecenderungan perkembangan proyek di masa yang akan datang dan organisasi kerja tim proyek. Lebih lanjut, manajemen komunikasi juga mengalami gangguan bila ada pekerja asing yang memiliki etnis berbeda, seperti hasil studi yang dilakukan Subramaniam *et al.* (2021). Dalam penelitian mereka terdapat gangguan kendala bahasa antara pekerja asing dari etnis yang berbeda serta antara pekerja asing dan pengawas terjadi karena selama pandemic komunikasi tatap muka berlangsung dengan terbatas.

Di dalam *Project Management Body of Knowledge Guide* (PMBOK) terdapat sepuluh area pengetahuan yang perlu dipahami untuk pengelolaan proyek yang efektif (PMI 2021). Salah satu diantaranya yaitu *project communication management*. Manajemen komunikasi proyek merupakan proses yang diperlukan agar informasi dan data yang telah diambil selama proyek dapat disimpan dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim proyek (PMI, 2021). Iman Soeharto (1999) menyebutkan komponen pendukung di dalam manajemen proyek yaitu pengelolaan komunikasi. Ada beberapa tahapan di dalamnya yaitu perencanaan komunikasi, distribusi informasi, dan laporan kinerja (Soeharto, 1999). Ketiga tahapan tersebut dapat meningkatkan fungsi komunikasi yang baik, diantaranya adalah pengelolaan terhadap konflik secara efektif, pelaksanaan dari rapat yang efektif, serta peningkatan keterampilan komunikasi lebih baik, penggunaan media komunikasi yang efektif, serta penggunaan sistem yang terintegrasi (Sidiq, n.d.).

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, mempelajari literatur, mengumpulkan data sekunder, data primer, menganalisis data,

melakukan pembahasan data dan kesimpulan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured in-depth interview*) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Wawancara dilakukan terkait dengan sistem manajemen Komunikasi di saat sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19 berlangsung.

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung (melalui e-mail). Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data pelaporan yang berkaitan dengan *monitoring* dan *controlling* selama tahapan pelaksanaan proyek. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan wawancara semi terstruktur terhadap 10 orang responden secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Narasumber sebanyak 10 orang adalah orang yang pernah menjadi PPK sekurang-kurangnya 3 tahun pada proyek konstruksi. Kualifikasi narasumber dapat dilihat pada tabel 1. Pengalaman narasumber dapat dilihat pada Gambar 1. Setelah seluruh data sekunder dan data primer diperoleh, kemudian dilakukan penterjemahan data audio wawancara ke dalam bentuk teks dengan menggunakan *Happyscribe*.

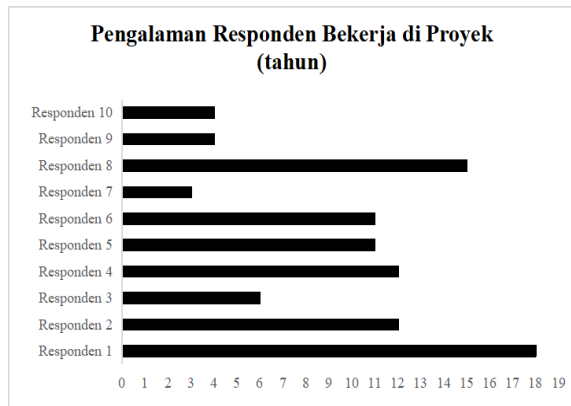
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kendala di Proyek

Dalam hal ini responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan kendala apa yang terjadi di proyek. Pandangan responden yaitu : (1) konsultan perencana tidak sesuai dalam melakukan design sehingga muncul adanya volume tambah dan kurang; (2) kendala di proses pelelangan dan proses pelaksanaan; (3) konsultan pengawas kurang berkomunikasi; (4) kualitas sumber daya manusia (SDM) konsultan sangat kurang; (5) kendala saat serah terima dimana owner kurang memiliki SDM dibidang teknik sipil; (6) oknum lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) sangat mudah memberi sertifikat keahlian; (7) sengketa dari masyarakat dan oknum dari

Tabel 1. Narasumber dan kualifikasi

Narasumber	Asal Institusi	Kualifikasi
Narasumber 1	Pelabuhan Indonesia I	Pejabat Proyek
Narasumber 2	Dinas PU Kab Padang Lawas	PPK
Narasumber 3	TIK BMN Gedung Kementerian Keuangan	PPK
Narasumber 4	Kementerian Perhubungan	PPK
Narasumber 5	Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang	PPK
Narasumber 6	Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang	PPK
Narasumber 7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan	PPK
Narasumber 8	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara	PPK
Narasumber 9	Universitas Negeri Medan-Kemendikbud Dikti	PPK
Narasumber 10	Dinas PUPR Kabupaten Serdang Bedagai	PPK



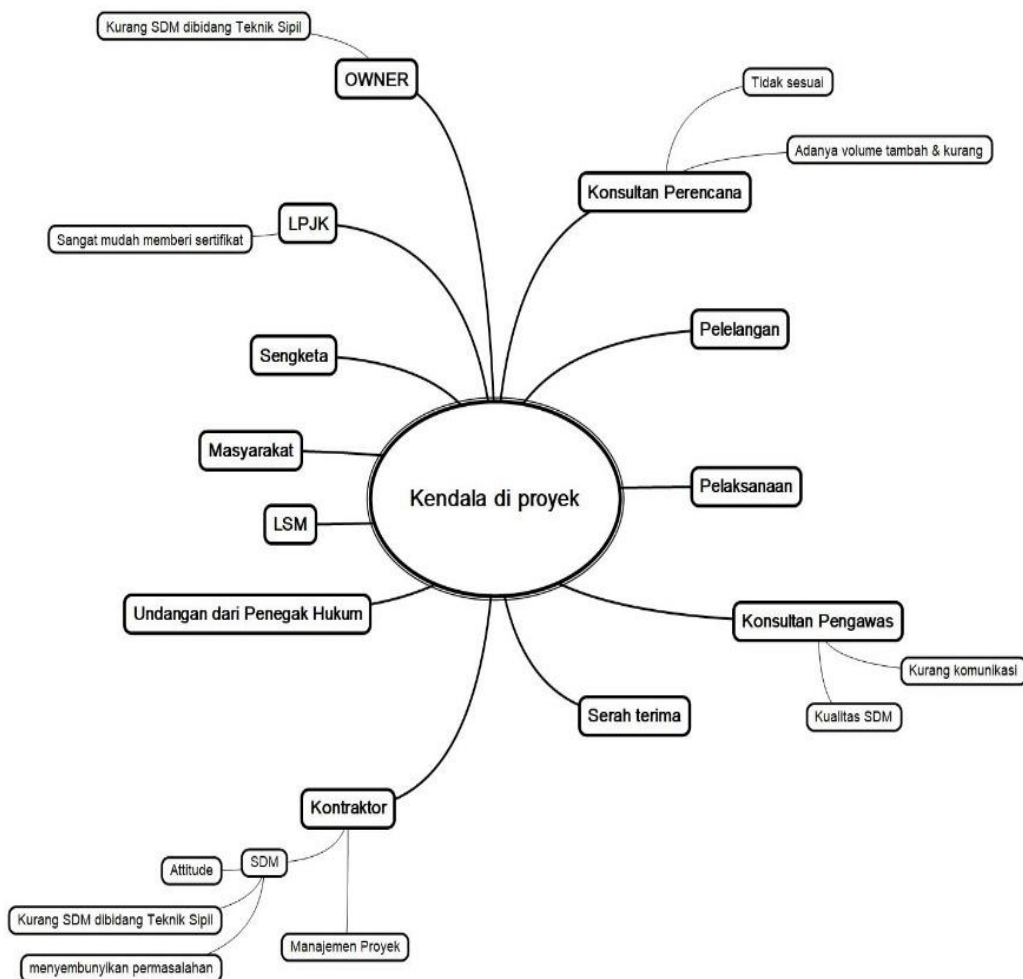
Gambar 1. Pengalaman narasumber

lembaga swadaya masyarakat (LSM); (8) seringnya waktu terpakai untuk memenuhi undangan dari penegak hukum; (9) kontraktor tidak memiliki *attitude* yang baik;

dan (10) kontraktor kurang memiliki SDM di bidang Teknik sipil, kontraktor menyembunyikan permasalahan di lapangan, dan belum memiliki manajemen proyek dengan baik. Pandangan responden mengenai kendala di proyek dapat dilihat pada Gambar 2.

3.2 Manajemen Komunikasi

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden mengenai manajemen komunikasi di proyek. Pandangan responden yaitu : (1) panitia pelelangan harus melakukan sinkronisasi terhadap persyaratan pelelangan; (2) memiliki komitmen yang kuat karena memiliki tujuan yang sama; (3) menjaga hubungan komunikasi yang efektif selama masa pelaksanaan; (4) *engineer* kontraktor harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan *engineer* konsultan; (5) hubungan antara pihak-pihak harus dijaga dan dibina; (6) mengumpulkan data yang baik selama proses perencanaan; (7) dalam perencanaan harus memahami regulasi dan standarisasi



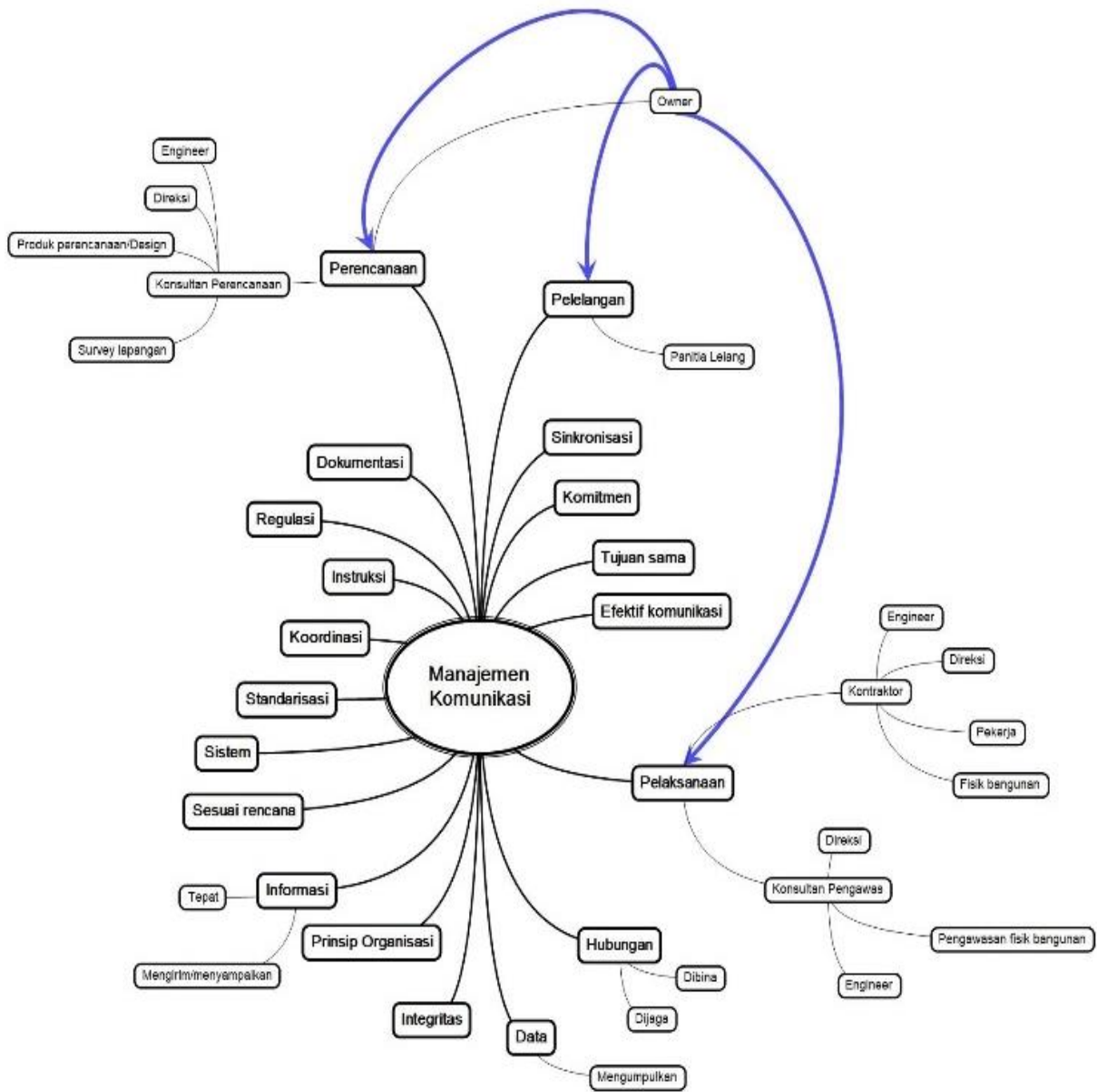
Gambar 2. Pandangan responden mengenai kendala di proyek

yang ada; (8) komunikasi sangat diperlukan agar tidak *miss communication* pekerjaan; (9) agar pesan tersampaikan dengan baik; dan (10) kontraktor harus memiliki SDM yg baik agar mudah mengarahkan pekerja. Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

3.3 Mekanisme pelaporan dan interaksi antar tim proyek

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman

responden mengenai mekanisme pelaporan dan interaksi antar tim proyek sebelum dan sesudah Covid-19. Pandangan responden yaitu : (1) mekanisme saat Covid dan sebelum datang pandemi tetap sama yaitu tetap ada laporan resmi baik *softcopy* maupun *hardcopy*; (2) kurva S tetap menjadi pedoman dalam monitoring pekerjaan; (3) frekuensi rapat dan kunjungan ke lapangan dibatasi; (4) tidak merasa puas atas hasil pekerjaan karena kurang kunjungan ke lapangan; (5) kurang mendapatkan gambaran secara langsung karena sedikit kunjungan ke



Gambar 3. Pandangan responden mengenai kendala di proyek

lapangan; (6) tidak ada perbedaan karena sudah diatur di kontrak; (7) interaksi tetap berlangsung secara rutin untuk evaluasi progres; (8) adanya rapat rutin misalnya mingguan dan bulanan; (9) bila frekuensi rapat sedikit akan sangat berpengaruh; dan (10) *work from home* membuat banyak pekerjaan sehingga kurang bertemu dengan penyedia sehingga menjadi kendala. Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

3.4 Peran konsultan pengawas

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden mengenai peran konsultan pengawas apakah berjalan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pandangan responden yaitu (1) konsultan pengawas bertugas membantu PPK; (2) selalu berada di lapangan; (3) sudah terbiasa menggunakan teknologi; (4) memberikan solusi teknis; (5) harus berpengalaman; (6) siaga dengan tambahan waktu; (7) memeriksa kualitas bahan; (8) sertifikat yg dimiliki harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi bidangnya; (9) harus memiliki komunikasi yang baik; (10) melaporkan perkembangan proyek, membuat laporan berkala, dan

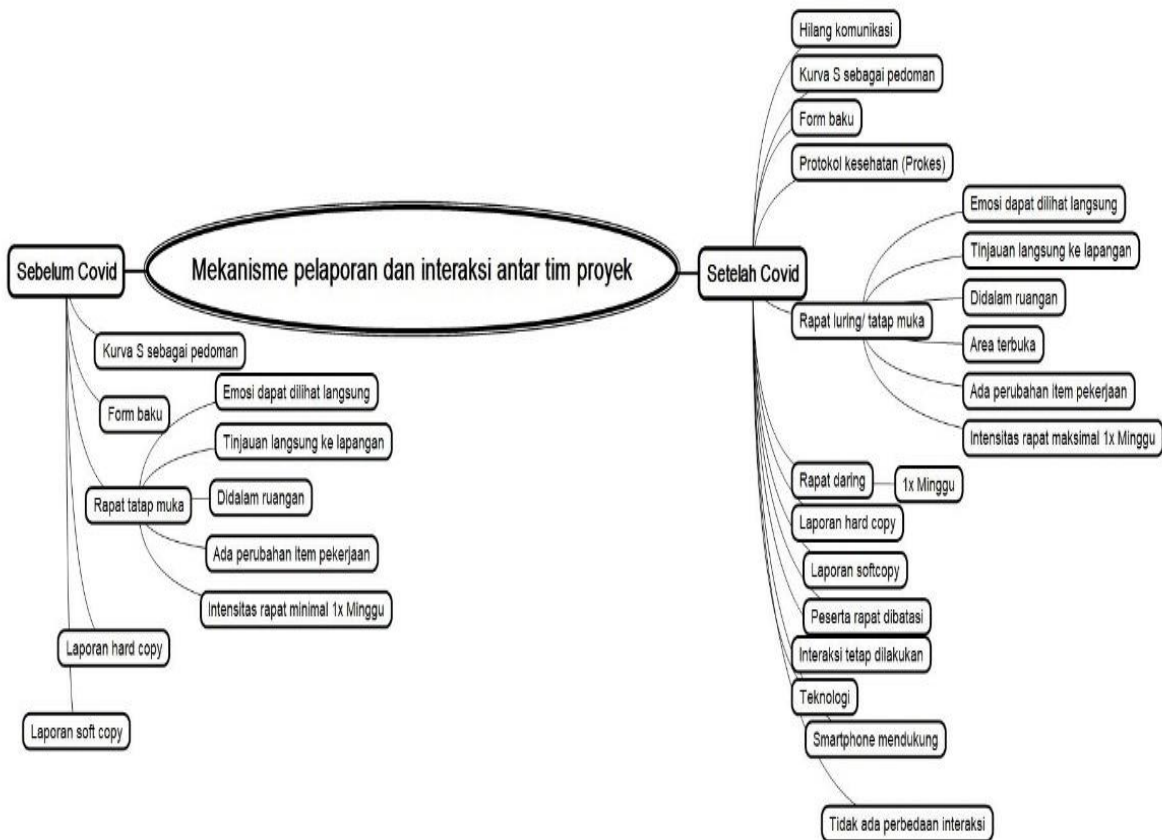
sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK). Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

3.5 Peran kontraktor

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden mengenai peran kontraktor dalam pelaporan progress proyek. Pandangan responden yaitu (1) kontraktor harus membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dapat dilakukan verifikasi oleh konsultan pengawas; (2) memahami undang-undang; (3) harus profesional; (4) memahami standarisasi teknis pekerjaan; (5) terbiasa menggunakan teknologi; (6) berintergritas; (7) konsisten pada mutu, spesifikasi dan RKS; (8) bertanggung jawab, memiliki komunikasi yang baik, dan dapat mensiasati pekerjaan dengan adanya perubahan alam; (9) menyediakan pekerja yang berkualitas; dan (10) menjaga kecepatan pekerjaan. Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

3.6 Memastikan kualitas pekerjaan

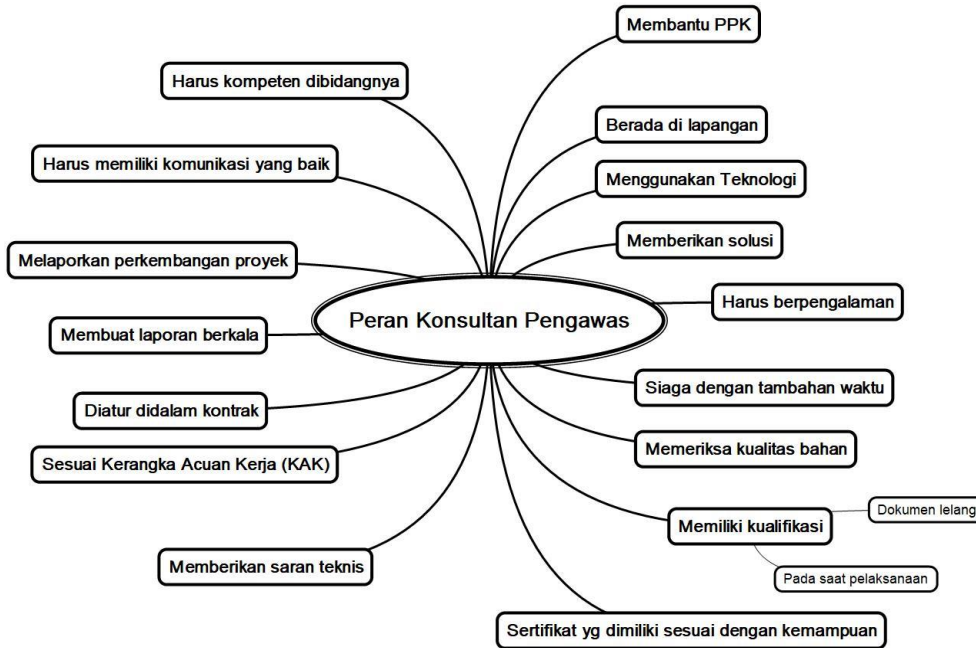
Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden mengenai



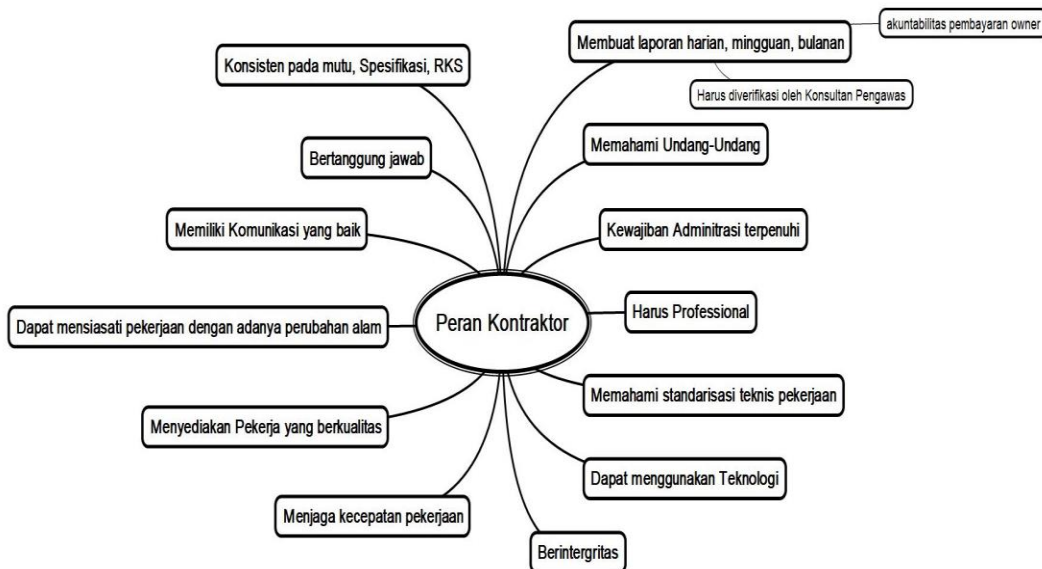
Gambar 4. Pandangan responden mengenai mekanisme pelaporan dan interaksi antar tim proyek sebelum dan sesudah covid-19

bagaimana cara memastikan kualitas dari pekerjaan proyek. Pandangan responden yaitu : (1) dari spesifikasi teknis; (2) pengendalian mutu jelas, mulai dari persetujuan sampai dengan eksekusi; (3) jika ada perubahan maka seluruh pihak dikomunikasikan bersama; (4) PPK melihat langsung turun ke lapangan dengan cara melakukan pengujian mutu secara langsung di lapangan; (5) konsultan merupakan saringan pertama untuk memeriksa mutu di lapangan, terlebih dahulu

memeriksa material sebelum diizinkan masuk ke lapangan; (6) mengacu pada dokumen kontrak karena sebagai dasar hukum pekerjaan konstruksi; (7) pekerjaan diawasi sepenuhnya oleh konsultan; (8) menerapkan rencana mutu kontrak, dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan; (9) kontraktor membuat surat pertanggung jawaban mutlak (SPJM) mulai dari test pertama sampai test akhir; dan (10) harus ada izin-izin pekerjaan dan diawasi sepenuhnya oleh konsultan. Pandangan responden



Gambar 5. Pandangan responden mengenai peran konsultan pengawas



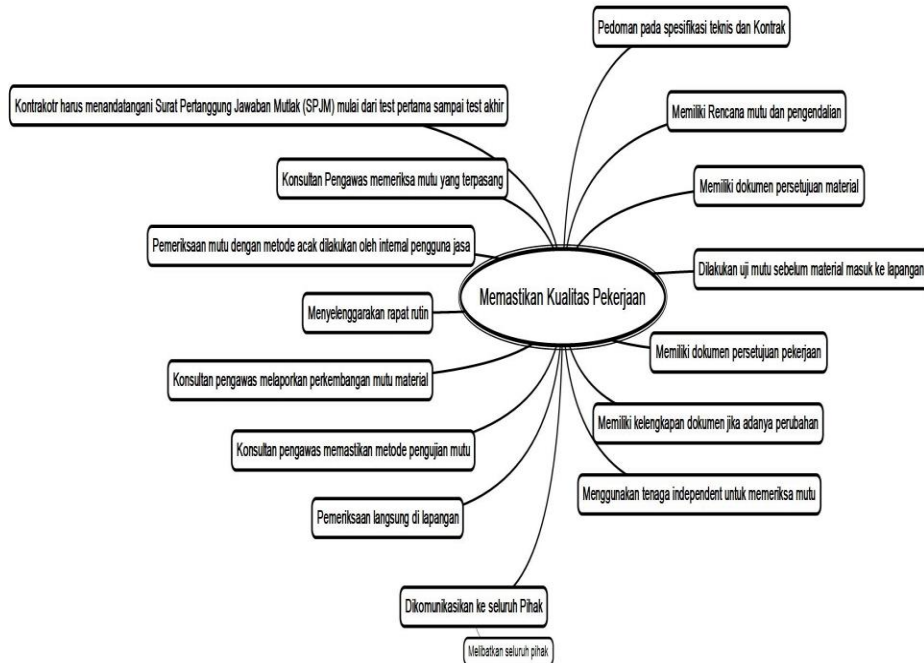
Gambar 6. Pandangan responden mengenai peran kontraktor

tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.

3.7 Mekanisme diinginkan

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman

responden mengenai mekanisme seperti apa yang diinginkan dari PPK untuk kedepannya. Pandangan responden yaitu : (1) harus ada standarisasi kerangka *framework* dalam melakukan pemeriksaan yang



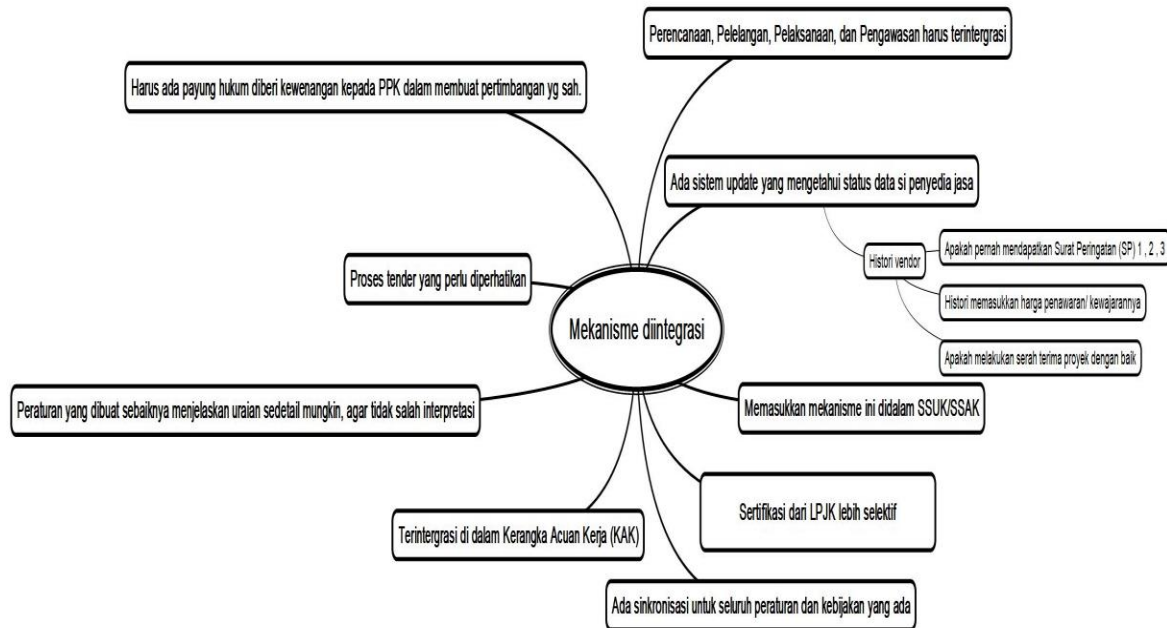
Gambar 7. Pandangan responden mengenai memastikan kualitas pekerjaan



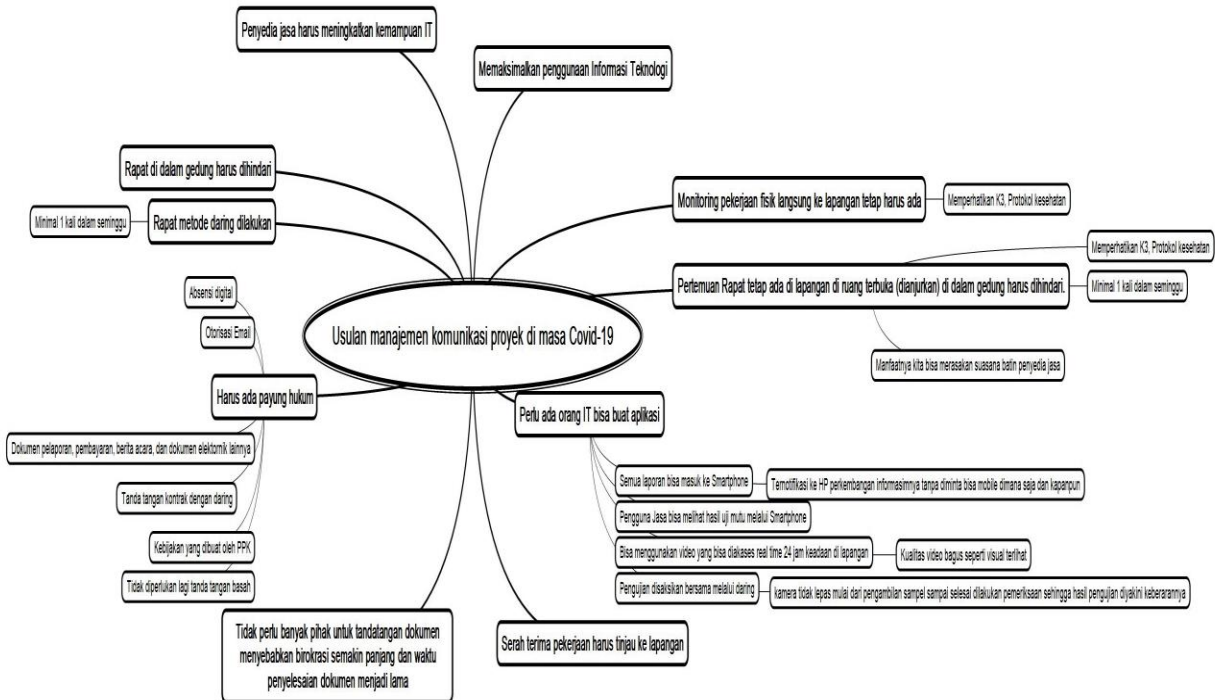
Gambar 8. Pandangan responden mengenai mekanisme diinginkan

dilakukan oleh suatu institusi pemeriksa baik dari penegak hukum maupun dari kelembagaan lainnya; (2) proses seleksi dalam pemilihan kontraktor dan konsultan lebih selektif dilakukan oleh tim pengadaan barang/jasa;

(3) harga terendah penawaran sebaiknya bukan menjadi patokan penilaian; (4) harus ada evaluasi kewajaran angka penawaran; (5) harus ada mekanisme kontrol terhadap keberlanjutan izin usaha kontraktor dan



Gambar 9. Pandangan responden mengenai mekanisme diintegrasikan



Gambar 10. Pandangan responden mengenai usulan manajemen komunikasi proyek di masa covid-19

konsultan; (6) harus ada tim khusus dari tim pengadaan barang/jasa untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap penyedia jasa; (7) payung hukum jelas; (8) tidak semua standarisasi teknis pekerjaan dapat diterapkan di Indonesia; (9) diperlukan standar yang sesuai dengan kondisi alam dan topografi di Indonesia; dan (10) dilakukan proses pengetatan sertifikat keahlian personil untuk menjaminnya kualitas di lapangan. Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

3.8 Mekanisme diintegrasikan

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden mengenai mekanisme yang baru yang diinginkan perlu diintegrasikan ke dalam kontrak. Pandangan responden yaitu : (1) perencanaan-pelelangan-pelaksanaan-pengawasan harus terintegrasikan; (2) harus ada sistem update yang mengetahui status data penyedia jasa misalnya histori vendor apakah pernah mendapatkan surat peringatan satu (SP 1), SP 2, SP 3; (3) histori vendor yang memasukkan harga penawaran yang tidak wajar; (4) histori vendor yang melakukan serah terima proyek dengan baik; (5) sebaiknya memasukkan mekanisme histori di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); (6) harus ada payung hukum diberi kewenangan kepada PPK dalam membuat pertimbangan yang sah; (7) peraturan yang dibuat sebaiknya menjelaskan uraian sedetail mungkin agar tidak salah interpretasi; (8) harus ada sinkronisasi untuk seluruh peraturan dan kebijakan yang ada; (9) memasukkan mekanisme prosedur di dalam SSUK dan di peraturan walikota/bupati dengan mengacu peraturan presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021, peraturan lembaga lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (Perlem LKPP) nomor 12 tahun 2021 sehingga membantu PPK; dan (10) sertifikasi dari LPJK lebih selektif. Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.

3.9 Usulan manajemen komunikasi proyek di masa Covid-19

Responden memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai pertanyaan pemahaman responden. Pertanyaan yang diajukan yakni mengenai usulan dan pandangan dari responden mengenai manajemen komunikasi proyek di masa Covid-19. Pandangan responden yaitu : (1) memaksimalkan penggunaan informasi teknologi (IT); (2) diperlukan orang IT yang bisa membuat aplikasi agar semua laporan bisa masuk ke dalam *smartphone*; (3) mendapatkan notifikasi di *smartphone* tentang perkembangan dan informasi proyek tanpa diminta dan dapat dilakukan secara *mobile* dimana saja dan kapanpun; (4) pengguna jasa bisa melihat hasil uji mutu melalui *smartphone*; (5) dapat diakses *realtime* 24 jam

keadaan di lapangan; (6) harus adanya otorisasi email pada dokumen pelaporan-pembayaran-berita acara, dan dokumen elektronik lainnya; (7) harus berkoordinasi dengan bagian hukum agar ada payung hukum; (8) kualitas IT harus mendukung; (9) drone dilakukan untuk memonitoring pekerjaan; dan (10) tidak perlu banyak pihak untuk tandatangan dokumen menyebabkan birokrasi semakin panjang dan waktu penyelesaian dokumen menjadi lama. Pandangan responden tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.

4. Kesimpulan

Permasalahan saat ini adalah sistem manajemen komunikasi proyek belum terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya sesuatu yang tidak sesuai harapan dari PPK dalam menghadapi dan mengarahkan penyedia barang dan jasa. Diperlukan suatu sistem terintegrasikan dalam pembuatan firma/perusahaan, verifikasi lapangan dalam pemilihan penyedia jasa, evaluasi perpanjangan izin perusahaan. Hal ini bertujuan agar pengguna jasa mendapatkan calon penyedia jasa yang tepat sesuai harapan. Selain itu, perlu dibuat digitalisasi kontrak/smart kontrak, yang didalamnya berisi gambar rencana, gambar kerja, rencana anggaran biaya pelaksanaan, rencana kerja syarat, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak dan dokumen penting lainnya, yang terhubung dengan *Smartphone*, memberi informasi secara notifikasi pemberitahuan progress di lapangan, menyampaikan perkembangan kegiatan setiap hari. Seluruh pihak yang berkecimpung di dalam kegiatan proyek baik pengguna jasa dan penyedia barang/jasa harus memiliki sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi, dan memiliki kualifikasi keahlian sesuai bidang masing-masing. Diperlukan payung hukum terkait adanya usulan dan mekanisme baru. Selain itu juga diperlukan sistem informasi teknologi untuk mengintegrasikan seluruh mekanisme yang dibuat agar mendukung sistem manajemen komunikasi proyek di masa pandemi Covid-19 dan di masa akan datang, beradaptasi dan menjalani suatu tatanan baru untuk jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sumatera Utara melalui Penelitian TALENTA Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: 6789/UN5.1.R/PPM/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini.

Daftar Pustaka

Ahmed, M. A., Sadri, A. M., Pradhananga, P., Elzomor, M., & Pradhananga, N. (2020). Social Media

- Communication Patterns of Construction Industry in Major Disasters. *Construction Research Congress 2020: Computer Applications - Selected Papers from the Construction Research Congress 2020*, 678–687. <https://doi.org/10.1061/9780784482865.072>
- Bednarz, A. L., Borkowska-Bierć, M., & Matejun, M. (2021). Managerial Responses to the Onset of the COVID-19 Pandemic in Healthcare Organizations Project Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 12082. <https://doi.org/10.3390/IJERPH182212082>
- Garro-Abarca, V., Palos-Sanchez, P., & Aguayo-Camacho, M. (2021). Virtual Teams in Times of Pandemic: Factors That Influence Performance. *Frontiers in Psychology*, 12, 232. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2021.624637/BIBTEX>
- Ihsanudin. (2020, March). *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Halaman all - Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Koch, J., & Schermuly, C. C. (2021). Managing the Crisis: How COVID-19 Demands Interact with Agile Project Management in Predicting Employee Exhaustion. *British Journal of Management*, 32(4), 1265–1283. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12536>
- PMI. (2021). *PMBOK Guide | Project Management Institute. PMBOK® Guide*. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/PMBOK>
- Prasetyo, R. F. (n.d.). *Identifikasi Efektifitas Faktor Pada Proses Kerja Engineering Kontraktor di Proyek Konstruksi Secara Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19*.
- Salamin, S., Khlefat, H., & Qusef, A. (2021). Communication Amid COVID-19 and Its Impact on Project Management Effectiveness: A Case Study from Jordan. *2021 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrical Engineering and Information Technology, JEEIT 2021 - Proceedings*, 199–204. <https://doi.org/10.1109/JEEIT53412.2021.9634146>
- Shi, F., Wang, S., Huang, J., & Hong, X. (2020). Design strategies and energy performance of a net-zero energy house based on natural philosophy. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13467581.2019.1696206>
- Sidiq, M. (n.d.). *Manajemen Komunikasi Proyek* Retrieved May 27, 2023, from https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Chapter_10_Manajemen_komunikasi_proyek.pdf
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual sampai Operasional)* (Vol. 1). Erlangga
- Stiles, S., Golightly, D., & Ryan, B. (2021). Impact of COVID-19 on health and safety in the construction sector. *Human Factors and Ergonomics In Manufacturing*. <https://doi.org/10.1002/hfm.20882>
- Subramaniam, C., Ismail, S., Durdyev, S., Nurul Mardiah Wan Mohd Rani, W., Fatin Syazwani Abu Bakar, N., Banaitis, A., Capozzoli, A., Chou, J.-S., Katsaprakakis, D., & Pacheco Torgal, F. (2021). Overcoming the Project Communications Management Breakdown amongst Foreign Workers during the COVID-19 Pandemic in Biophilia Inveigled Construction Projects in Malaysia. *Energies 2021, Vol. 14, Page 4790, 14(16)*, 4790. <https://doi.org/10.3390/EN14164790>